

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara sehubungan dengan Manajemen Kas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat saya rumuskan adalah sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan manajemen kas dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari fungsi manajemen kas yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan yaitu perencanaan kas, pelaksanaan kas, penatausahaan kas, pertanggungjawaban kas dan pengawasan kas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara terencana, transparan, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan.

##### a. Perencanaan Kas

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan kas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai cukup baik. Dilihat dari adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun tidak dilengkapi dengan anggaran kas sebagai dokumen yang diperlukan untuk memproyeksi perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada unit kerja. Dinas Pariwisata untuk melihat anggaran kas dinilai dari DPA.

b. Pelaksanaan Kas

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kas yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan baik. Dilihat dari adanya pencatatan penerimaan yang dilakukan yaitu dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan realisasi penerimaan dan daftar penerimaan kas.

Pencatatan pengeluaran yang dilakukan yaitu dalam bentuk daftar realisasi keuangan dan sisa kas di bendahara pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban – bendahara pengeluaran.

c. Penatausahaan Kas

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk penatausahaan kas dilakukan dengan baik, untuk penerimaan dan pengeluaran. Dilihat dari pencatatan yang dilakukan dengan tertib, rapi, sesuai dengan kode akun dan pencatatan yang dilakukan dilengkapi oleh bukti – bukti transaksi serta pencatatan yang dilakukan secara tersistem menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDA) sehingga dikatakan efektif dan efisien.

d. Pertanggungjawaban Kas

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk pertanggungjawaban kas yang dilakukan dengan baik, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Dimana

pertanggungjawaban dikaitkan dengan hasil sebagai bentuk akuntabilitas / pertanggungjawaban.

Bentuk pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan yaitu Laporan realisasi anggaran, dan laporan pencatatan daftar kas dibendahara penerimaan. Serta bentuk pertanggungjawaban untuk bendahara pengeluaran yaitu daftar realisasi keuangan dan sisa kas di bendahara pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban dibendahara pengeluaran.

e. Pengawasan Kas

Berdasarkan hasil observasi, wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk pengawasan kas yang dilakukan baik pada penerimaan maupun pengeluaran sudah dilakukan dengan baik dilihat dari adanya tim verivikator yang digunakan untuk memeriksa kesalaham bukti transaksi dengan kenyataan dilapangan, selemu melakukan pemeriksaan audit secara berkala baik yang dilakukan oleh pemeriksaan internal yang dilakukan oleh auditor internal maupun ekseternal (inspektorat dan BPK).

## 6.2 Saran

Saran dari peneliti untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah

1. Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat anggaran kas untuk memproyeksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi, tidak hanya mengandalkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja.
2. Sebaiknya pencatatan kas juga tersistem menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar saldo kas dapat tercantum di

laporan keuangan lainya sehingga membuat Dinas Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif lebih mudah mengetahui posisi kas mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Surya. Dkk. 2016. “Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan” dalam jurnal jaganis volume 1 (No. 2). Riau. STIA Indrigari.
- Anisma Yuneita. Dkk. 2010. “Evaluasi Manajemen Pengelolaan Kas Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir”. Dalam jurnal ekonomi Volume 18 (No. 1). Pekanbaru
- Halim Abdul. Dkk.2019. “Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penerbit UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Irsyad Jamil.2019. “ Analisis Manajemen Kas Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatra Utara”. Medan : Universitas Sumatra Utara.
- Mahmudi.2010. “Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit Erlangga.Jakarta.
- Mahmudi.2019. “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penerbit UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pura Rizki.2018. “Analisis Manajemen Kas Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara periode 2014 – 2016”. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Siregar,Syofian.2015.”Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS.Jakarta: Kencana
- Suharsaputra,Uhar.2014.”Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan”.Bandung: PT Refika Aditama.
- [https://syukriy.wordpress.com/2010/02/05/manajemen-kas-daerah/#:~:text=Manajemen%20kas%20merupakan%20fungsi%20yang,s%20cara%20terencana%20transparan%20dan%20akuntabel.\(diakses tanggal 4 Maret 2021\)](https://syukriy.wordpress.com/2010/02/05/manajemen-kas-daerah/#:~:text=Manajemen%20kas%20merupakan%20fungsi%20yang,s%20cara%20terencana%20transparan%20dan%20akuntabel.(diakses%20tanggal%204%20Maret%202021))
- [https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/39TAHUN2007PP.htm#:~:text=Kas%20Daerah%20adalah%20tempat%20penyimpanan,dan%20membayar%20seluruh%20pengeluaran%20daerah.\(diakses tanggal 12 Maret 2021\)](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/39TAHUN2007PP.htm#:~:text=Kas%20Daerah%20adalah%20tempat%20penyimpanan,dan%20membayar%20seluruh%20pengeluaran%20daerah.(diakses%20tanggal%2012%20Maret%202021))
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-memahami-akuntansi-kas-pada-pemerintah-daerah-akuntansi-kas-pada->

[satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-2019-11-05-90c4b3ce](#)(diakses tanggal 20 Maret 2021)

<https://kumparan.com/arif-ramadhan1520388067786/meminimalisir-penyimpangan-pengelolaan-kas-daerah-apakah-cukup-dengan-aturan-dan-sanksi-1522035303366>(diakses tanggal 4 April 2021)